

DOMINASI IDEOLOGI MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI BERITA KASUS AHMADIYAH CIKEUSIK TAHUN 2011 DI MAJALAH TEMPO

Nursatyo

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Nasional
nursatyo3@gmail.com

Abstract

The violation of Ahmadiyah adherents in Cikeusik on February 6, 2011 widely reported by various media in Indonesia. One of the media that clearly states its position in defense of Ahmadiyah is a Tempo magazine. Tempo's position is opposite with the dominant view, that Ahmadiyah doctrines are not appropriate and deviate from Islamic doctrines. This article reviews the role of intra and extra media affecting the news production process in Tempo magazine. Through interviews with several informants from Tempo magazine, this study shows that media ideology of Tempo which is liberal, secular and pluralist very dominant with the news production process. Factors individuals, organizations, and extra media is subordinate to Tempo ideology. Even the media routines further strengthen Tempo ideology. In its news, Tempo seeks to follow the principle of journalism, that is the voice of the oppressed. Tempo considers Ahmadiyah as a oppressed group because always being the victims of violence from those who represent the dominant view.

Keywords – *intra and extra media, media ideology, ahmadiyah, tempo media.*

Pendahuluan

Pembicaraan tentang agama di Indonesia adalah hal yang sangat sensitif. Agama seringkali menjadi pemicu munculnya konflik sosial. Tidak hanya pada agama yang berbeda, bahkan dalam satu agama pun seringkali menimbulkan konflik yang memakan korban jiwa. Tidak dipungkiri dalam satu agama saja terdapat berbagai macam aliran atau kelompok yang memiliki cara penafsiran tersendiri terhadap ajaran agamanya. Perbedaan interpretasi ajaran agama itulah yang akhirnya menimbulkan persoalan.

Salah satu kelompok agama yang menjadi persoalan di Indonesia adalah Ahmadiyah. Kontroversi tentang Ahmadiyah sebenarnya telah muncul

sejak lama yaitu sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat¹. Sejak itu protes terhadap Ahmadiyah gencar dilakukan oleh berbagai ormas Islam.

Sejarah Ahmadiyah tidak lepas dari pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad, seorang warga India (1835 - 1908). Ajaran Ahmadiyah sendiri dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.² Anggota Jemaat Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore.

Ajaran Ahmadiyah kemudian berkembang ke berbagai negara. Hingga kini jumlah anggota Jemaat Ahmadiyah lebih dari 150 juta orang yang tersebar di 185 negara di dunia. Ajaran Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 melalui kedatangan seorang pemuka Ahmadiyah Maulana Rahmat Ali HAOT di wilayah Sumatera. Tahun 1926 Jemaat Ahmadiyah mulai resmi berdiri sebagai organisasi.

Kelompok Ahmadiyah Qadian di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Bogor, berbadan hukum pada tahun 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Sedangkan kelompok Ahmadiyah Lahore membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35.³

Beberapa pemahaman tentang ajaran keislaman menuai kontroversi, seperti tentang pemaknaan nabi terakhir, kebangkitan Nabi Isa AS, dan kedatangan Imam Mahdi. Ahmadiyah menganggap kenabian tidak terputus pada Nabi Muhammad SAW, namun kenabian setelahnya tidak membawa syariat baru kecuali melanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu, tokoh sentral mereka yakni Mirza Ghulam Ahmad dipercaya sebagai nabi karena telah menerima wahyu dari Tuhan.

Keyakinan tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi inilah yang memicu penolakan dari kelompok Islam pada umumnya yang memiliki keyakinan bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Meskipun keyakinan itu sebenarnya hanya dianut oleh kelompok Ahmadiyah Qadian, sementara Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza Ghulam Ahmad

merupakan seorang pembaharu (mujadid). Fatwa MUI pada tahun 1980 hanya menyebutkan jemaat Ahmadiyah Qadiyan yang sesat. Namun dalam fatwa MUI tahun 2005 menyatakan “*Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan*”,⁴ Sejak itulah seluruh pengikut Ahmadiyah dicap sesat.

Dampak fatwa tersebut sangatlah nyata. Berbagai aksi menuntut pembubaran Ahmadiyah dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Gerakan Umat Islam. Tidak jarang aksi-aksi tersebut menimbulkan peristiwa kekerasan yang menyebabkan jemaat Ahmadiyah menjadi korban.

Tahun 2005 terjadi aksi demonstrasi yang berbuntut kerusuhan dilakukan oleh FPI dan Gerakan Umat Islam di kampus Mubarak, Parung, Bogor yang merupakan markas dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tahun 2008 terjadi aksi penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang dituding mendukung Ahmadiyah di lapangan Monas Jakarta. Tahun 2010 terjadi aksi penyerangan terhadap masjid milik Ahmadiyah di Surabaya, Banten dan Jawa Barat. Terakhir, adalah peristiwa penyerangan rumah salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada tanggal 6 Februari 2011 yang mengakibatkan tiga orang jemaat Ahmadiyah meninggal dunia.

Upaya pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tahun 2008 pasca peristiwa penyerangan terhadap AKKBB di lapangan Monas. SKB tersebut memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya. Namun kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah tidaklah surut. Data yang disajikan oleh majalah Tempo menunjukkan bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah malah semakin meningkat pasca keluarnya SKB Tiga Menteri. Tahun 2010 tercatat 12 kali peristiwa kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.⁵

Kontroversi Ahmadiyah -ditambah dengan peristiwa terakhir tentang penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik- telah mendapat liputan yang meluas dari pelbagai media. Beragam berita pun muncul dalam membingkai fenomena tersebut baik yang seakan mendukung maupun mengecam jemaat Ahmadiyah. Media memang pada dasarnya bukanlah sebuah entitas yang bebas nilai. Media menurut pandangan konstruksionis merupakan organisasi

yang aktif dalam menyebarkan nilai dan sikapnya terhadap suatu peristiwa meski hal itu disiasati dalam pemberitaan yang faktual dan berimbang.

Dalam soal Ahmadiyah, pandangan dominan yang diwakili oleh banyak organisasi Islam dan dinyatakan secara resmi dalam fatwa MUI, menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran yang sesat. Ajaran Ahmadiyah dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Mereka pun menuntut agar Ahmadiyah segera dibubarkan atau menjadi agama baru di luar Islam. Pandangan dominan itulah yang mengemuka hampir di seluruh media nasional baik cetak, elektronik maupun internet.

Namun tidak semua media memiliki sudut pandang yang sama dengan cara mengadopsi pandangan dominan tersebut. Salah satunya adalah majalah Tempo. Seminggu setelah peristiwa Cikeusik, majalah Tempo langsung menerbitkan peristiwa tersebut dalam sampul muka (cover) dan laporan utama. Bahkan dalam edisi berikutnya majalah Tempo seakan langsung menuding salah satu kelompok ormas Islam yang berada di balik penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.

Sikap resmi Tempo yang tertulis dalam kolom Opini pada edisi 14 – 20 Februari 2011 secara tegas menyalahkan pemerintah yang telah melakukan pembiaran terhadap aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Tempo berpendapat bahwa Ahmadiyah memiliki hak yang sama dengan seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki keyakinan dan beribadah menurut keyakinannya. *“Pemerintah, MUI, atau lembaga mana pun tak memiliki otoritas menentukan label Islam atau bukan Islam bagi Ahmadiyah. Setiap bentuk pemaksaan dalam berkeyakinan dan menjalankan keyakinan merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi”*, begitu tulisan pada Opini Tempo yang berjudul “Ahmadiyah Tanpa Negara”. Dalam dua berita utama yang diturunkan, Tempo juga banyak menyajikan data-data tentang kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah.

Jika melihat cara Tempo menyajikan berita tentang kasus Cikeusik dan juga opini redaksi, Tempo terlihat lebih berani dalam menyatakan pandangannya menentang pandangan dominan yang menghendaki Ahmadiyah dibubarkan. Majalah Tempo dengan jelas berupaya untuk mengangkat Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang mempunyai hak dan ruang untuk menjalani rutinitas ibadahnya atas dasar hak asasi manusia.

Pada edisi Majalah Tempo berikutnya yakni edisi 21 – 27 Februari 2011, Tempo dengan jelas menuding FPI yang berada di balik peristiwa Cikeusik tersebut. Judul Cover tertulis “MENGAPA HARUS TAKUT” bergambar karikatur presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhadapan dengan alat pengeras suara berbalut sorban. Di bawah judul tersebut tertulis “Agar berani menindak Front Pembela Islam, SBY membutuhkan dukungan DPR dan kajian Mahkamah Agung”. Tempo berpandangan bahwa kekerasan yang terjadi pada anggota jemaat Ahmadiyah disebabkan oleh adanya organisasi yang anarkis.

**Gambar 1. Cover Majalah Tempo
Edisi 21 – 27 Februari 2011**



“Pihak yang melanggar rambu-rambu itu harus segera dihukum tanpa pandang bulu. Kebiasaan main hakim sendiri dan pengerahan massa dengan maksud mengancam pihak lain mesti mendapat sanksi tegas. Sudah sewajarnya pula bila orang yang terbukti melakukan kekerasan mendapat hukuman pidana”, begitu tulis Opini Tempo yang berjudul “Membubarkan Organisasi Anarkis”.

Keberpihakan Tempo terhadap Ahmadiyah juga tertulis secara jelas pada edisi ulang tahun majalah Tempo ke-40 Edisi Kecap Dapur 7 – 13

Maret 2011. Dalam artikel berjudul “Bukan Menjilat dan Menghamba”, tertulis sebagai berikut :

“Benarkah Tempo tak memihak? Sebetulnya tidak juga. Dalam sejumlah isu, pemihakan Tempo terlihat jelas. Katakanlah soal Ahmadiyah. Dalam isu yang satu ini, Tempo menganggap semua warga negara berhak memilih keyakinannya. Karena itu, meski sebagian umat Islam menyatakan Ahmadiyah sesat dan dianjurkan keluar dari Islam –karena mengakui ada nabi selain Muhammad– Tempo konsisten menyatakan Ahmadiyah berhak menyebut diri sebagai bagian dari Islam.”

Sebuah berita pada dasarnya adalah hasil dari pertarungan banyak kepentingan. Shoemaker dan Reese menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi isi media yaitu faktor individu, rutinitas media, organisasi, ekstra media dan ideologi. Penulis mengelompokkan faktor individu, rutinitas media, organisasi dan ideologi ke dalam faktor intra media. Masing-masing faktor diasumsikan memiliki pengaruh terhadap isi media, termasuk berita.

Maka, melihat keberpihakan majalah Tempo terhadap Ahmadiyah yang melawan pandangan dominan, penelitian ini mencoba untuk menggali bagaimana peran intra media dan ekstra media dalam proses produksi berita peristiwa penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik.

Teori Pengaruh Isi Media

Apa yang disajikan media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996) menyusun berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan seperti:

1. Faktor individual

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama, dan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa mempengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan media.

2. Rutinitas media

Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya.

3. Organisasi.

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan jurnalis bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya jurnalis bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.

4. Ekstra media.

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi media ini sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media:

- **Sumber Berita**

Sumber berita di sini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan: memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita tentu memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Kepentingan sumber berita ini sering kali tidak disadari oleh media.

- **Sumber Penghasilan Media**

Sumber disini dapat berupa iklan maupun pelanggan/pembeli media. Media harus bertahan, dan untuk bertahan hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Ia tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan di antaranya dengan cara memaksa media mengembargo berita yang buruk bagi mereka. Pelanggan dalam banyak hal juga ikut mewarnai pemberitaan media. Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus-menerus diliput oleh media. Media tidak akan menyia-nyaiakan momentum peristiwa yang disenangi oleh khalayak.

- **Pemerintah dan lingkungan bisnis**

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Dalam negara yang otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini tentu saja berbeda di negara yang demokratis dan menganut liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.

5. Ideologi

Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan

bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Idealisme media tidak lain merupakan idealisme jurnalis itu sendiri. Idealisme jurnalis merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) mencoba merumuskan idealisme jurnalis yang kemudian disebutnya sebagai elemen-elemen jurnalisme yang merupakan perpaduan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh wartawan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang wartawan dihadapkan pada berbagai macam godaan yang dapat meruntuhkan tugas utamanya menyajikan informasi kepada masyarakat. Godaan yang berasal dari kekuasaan dan juga kalangan yang menjadi objek pemberitaan seringkali membuat wartawan bertindak layaknya seorang *public relation* yang hanya menyebarkan informasi yang baik dan menutup rapat-rapat informasi yang buruk. Padahal tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri (Kovach, 2001).

Maka, setelah melalui kajian yang mendalam terhadap praktik jurnalisme yang dilakukan oleh wartawan dan harapan masyarakat yang ada di Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tome Rosenstiel merumuskan elemen-elemen jurnalisme yang berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh wartawan. Elemen ini akhirnya menjadi prinsip dan idealisme yang seharusnya dipegang oleh media sebagai lembaga jurnalisme.

Berikut elemen-elemen jurnalisme yang menjadi pedoman bagi wartawan:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai bukan kebenaran mutlak atau filosofis. Kebenaran disini juga lebih dari sekedar akurasi. Kebenaran yang dimaksud merupakan bentuk

kebenaran yang praktis dan fungsional, merupakan pekerjaan sortir yang berkembang antara cerita pertama dan interaksinya di tengah publik, pembuat berita dan jurnalis sepanjang waktu. Prinsip pertama jurnalisisme ini—pengejaran kebenaran tidak berat sebelah—adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain.

2. Loyalitas pertama jurnalisisme adalah kepada warga (citizens)

Konstituen organisasi media amatlah banyak, seperti organisasi masyarakat, perusahaan induk media itu sendiri, pemegang saham, pemasang iklan, dan banyak kepentingan lainnya yang harus diperhatikan oleh media. Namun, komitmen kepada warga harus lebih besar ketimbang egoisme profesional. Jurnalis bukanlah seperti pegawai perusahaan. Mereka punya kewajiban sosial yang sesekali bisa berseberangan dengan kepentingan majikan mereka. Kesetiaan pada warga ini adalah makna lain dari istilah independensi jurnalistik.

3. Esensi jurnalisisme adalah disiplin verifikasi

Disiplin verifikasi adalah ihwal yang memisahkan jurnalisisme dari hiburan, propaganda, *fiksi*, atau seni. Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai “obyektivitas” dalam jurnalisisme, maka yang obyektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita.

4. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput

Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini, tidak bersikap netral. Namun, ia harus independen, dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi.

5. Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan dan menyuarakan kaum tak bersuara

Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar memantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Jurnalis juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik

Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap.

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan

Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar atau ditonton. Jurnalis memiliki dua tantangan dalam mencari berita. Pertama adalah menemukan informasi yang dibutuhkan orang untuk menjalani hidup mereka. Tantangan kedua adalah membuatnya bermakna, relevan dan enak disimak.

8. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional

Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif.

9. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka

Setiap jurnalis, dari redaksi hingga dewan direksi, harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal, atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma post-positivisme dengan desain penelitian Studi Kasus (*Case Study*) yang hanya memfokuskan pengamatan pada proses produksi berita di majalah Tempo tentang peristiwa penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini tidak mencoba untuk menggeneralisir pada proses produksi berita di majalah Tempo secara umum.

Untuk mendapatkan data-data penelitian, digunakan metode wawancara terhadap beberapa informan dari majalah Tempo selain juga dokumentasi sumber-sumber utama penelitian yaitu majalah Tempo edisi 14 – 20 Februari 2011, edisi 21 – 27 Februari 2011 dan edisi 7 – 13 Maret 2011. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah satu orang Redaktur (informan 1), satu orang Corporate Secretary (informan 2) dan satu orang wartawan yang melakukan peliputan peristiwa Cikeusik (informan 3).

Untuk menguraikan data-data yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik dengan cara mengelompokkan data dalam dua tema besar yaitu tema tentang proses produksi berita di majalah Tempo terkait kasus Ahmadiyah Cikeusik dan tema tentang pandangan Tempo terhadap Ahmadiyah dan Cikeusik. Dalam tema proses produksi berita di majalah Tempo akan dipaparkan mengenai peran intra media dan ekstra media dalam proses produksi berita.

Pengaruh Intra dan Ekstra Media Dalam Proses Produksi Berita Tempo

Satu hari pasca peristiwa Cikeusik tanggal 6 Februari, Senin pagi seperti biasa diadakan rapat rutin redaksi. Menurut informan 3 dalam rapat redaksi tersebut kasus Ahmadiyah dibahas secara mendalam. Hal ini disebabkan karena peristiwa tersebut memiliki nilai berita yang besar, yakni konflik. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengirim wartawan dari

Jakarta untuk mengumpulkan fakta-fakta di Cikeusik. Hari itu pula informan 3 sudah berangkat menuju Cikeusik, Pandeglang, Banten. Ia berada di lokasi peristiwa mengumpulkan data selama empat hari yaitu sejak Senin (6/2) hingga Kamis (9/2). Informan 3 berusaha mewawancara berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut, mulai dari keluarga, tetangga, aparat kepolisian, kepala desa dan juga termasuk pihak penyerang.

Kesulitan yang dihadapi oleh informan 3 di lapangan adalah wawancara terhadap pihak penyerang lantaran pihak kepolisian telah mengamankan dan mengisolasi mereka dari wartawan. Informan 3 terus berusaha mendapatkan keterangan dari pihak penyerang karena menurutnya informasi tersebut menjadi nilai jual yang membedakannya dengan media harian yang telah memberitakan peristiwa itu. Menurut informan 3, meski ia sudah mengumpulkan data kronologis peristiwa tersebut, sebelum mendapatkan konfirmasi dari pihak penyerang data-data tadi kurang kuat dan akurat. Setelah beberapa kali menemui kegagalan, pada hari terakhir, informan 3 akhirnya berhasil menyusup ke ruang interogasi kepolisian dan mendapatkan keterangan dari pihak penyerang. Ia pun berhasil memenuhi batas akhir pengumpulan naskah berita di redaksi pada hari Jumat (10/2).

Dari proses produksi berita tersebut, akan diuraikan bagaimana peran intra media dan ekstra media sesuai dengan Teori Pengaruh Isi Media (Shoemaker & Reese)

1. Individual

Faktor individual berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Di sini level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama, dan sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa mempengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan media.

Dalam proses produksi berita peristiwa Ahmadiyah Cikeusik ini, individu yang lebih berperan dalam mengumpulkan data dan fakta adalah wartawan. Bahkan untuk pengumpulan data utama secara langsung di Cikeusik, majalah Tempo hanya mengutus satu orang wartawan yaitu informan 3. Sementara wartawan lainnya hanya mengumpulkan data

sekunder di Jakarta. Meski demikian, dalam proses editing dan merangkai tulisan redaktur pelaksana memiliki peran yang juga signifikan. Di majalah Tempo sebuah laporan utama diserahkan pada masing-masing bidang (desk) tergantung keterkaitan isu tersebut pada bidangnya masing-masing. Untuk peristiwa Ahmadiyah Cikeusik sendiri diputuskan terkait dengan desk nasional dan oleh karenanya dikerjakan oleh tim desk nasional.

2. Rutinitas Media

Rutinitas media terkait dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya memiliki ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita yang baik, atau kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk, peristiwa apa yang akan diliput, dan bentuk pendelegasian tugas penulisan berita.

Majalah Tempo adalah majalah mingguan yang terbit setiap hari Senin. Asas jurnalisme yang dianut majalah Tempo adalah jurnalisme yang menjunjung argumen kuat, data terpercaya, dan kejelasan. Oleh karena itulah keterampilan meramu data dan fakta menjadi berita yang meyakinkan dengan menggali bahan yang tak tampak di permukaan atau sengaja disembunyikan oleh pelakunya menjadi keharusan bagi setiap wartawan Tempo. Selain itu memperkuat penggalian bahan berita di lapangan, *check* dan *recheck*, menjaga keseimbangan berita, dan berpegang pada kode etik wajib dilakukan untuk mengantisipasi gugatan dari pihak-pihak yang berkeberatan dengan berita di majalah Tempo. Hal tersebut terungkap dalam penjelasan informan 2:

“Kita berhati-hati dalam artian untuk meningkatkan profesionalitas. Kedua, menjalankan kode etik secara sempurna. Dengan profesionalitas, kita sudah cover both sides dan sesuai kode etik, kita tidak keberatan dengan yang melakukan complain atau gugatan, menurut kita itu suatu yang wajar. Namun dengan adanya gugatan/complain membuat kita tidak cukup dengan kompetensi sebelumnya, kita harus meningkatkan kompetensi wartawan internal. Tim yang dilibatkan itu lebih besar SDM-nya atau lebih kuat. Proses cek dan ricek itu tidak cukup satu kali. Harus kita menceknya dari berbagai sumber”.

Rutinitas dalam memproduksi berita di majalah Tempo dimulai dari rapat perencanaan di tingkat kompartemen dan rapat redaksi yang berlangsung pada hari Senin. Di tingkat kompartemen, seluruh awak redaksi di masing-masing kompartemen majalah Tempo seperti kompartemen hukum, nasional, ekonomi, sains dan teknologi, serta kompartemen lainnya memberikan usulan tentang rencana tulisan atau berita yang akan diangkat dalam suatu edisi. Seperti yang diutarakan oleh informan 3:

“Nah kalo di sini itu (di tingkat kompartemen) di Tempo itu setiap awak redaksi wajib mengusulkan rencana tulisan, apa yang menarik. Desk nasional misalnya ngumpulnya di meja redaktur pelaksana nasional. Desk hukum misalnya di hukum di redaktornya mejanya di lantai 2 ngumpul semua awak”.

Hasil dari rapat kompartemen kemudian dibawa ke dalam rapat redaksi yang dihadiri oleh pemimpin redaksi, reporter, fotografer, hingga staf perpustakaan. Dalam rapat tersebut keputusan dibuat atas dasar kesepakatan bersama, seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“Ini kan rapat redaksi, disitulah diperdebatkan point of view masing-masing individu sampai mencapai kesepakatan point of view yang akan diangkat Tempo mengenai suatu kasus/masalah. Point of view yang disepakati itulah yang menjadi dasar/basic penugasan yang dijalankan”.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan informan 3:

“Di Tempo itu tidak ada satupun keputusan yang diputuskan oleh pribadi. Jadi semua melalui rapat, baik tulisan yang keluar/terbit hari ini, itu berdasarkan keputusan rapat redaksi yang dihadiri dari pemred sampai reporter bahkan gak cuma reporter dari staf perpustakaan juga dateng, foto dateng jadi semua urun rembug untuk perencanaan tulisan”.

Sementara sikap Tempo terhadap suatu isu/masalah dapat dilihat dalam kolom Opini yang dibahas dalam rapat opini. Menurut informan 1 Opini merupakan sebuah ruang perdebatan ide dan argumentasi.

“Opini itu sebuah ruang perdebatan ide dan argumentasi. ... Nah argumentasi yang ditulis dalam Opini itu hasil dari penggodokan dalam forum rapat itu”.

Informan 3 menguatkan pendapat tersebut:

“Opini kan pendapat atau sikap redaksi terhadap suatu persoalan yang telah terjadi. Jadi opini ya memang sangat sifatnya mungkin lebih subyektif ya lebih subyektif beda dengan artikel yang harus..harus obyektif”.

Proses produksi kolom Opini berlangsung dalam Rapat Opini yang merupakan pertemuan para redaktur, mulai redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, redaktur eksekutif dan redaktur senior. Diadakan setiap hari Rabu, dalam rapat itulah setiap argumen diuji. Dalam rapat tersebut setiap redaktur pelaksana mengajukan usul yang merupakan hasil kesepakatan rapat redaksi di masing-masing kompartemen yang dipimpinnya untuk menjadi kolom Opini. Dalam setiap edisi Tempo ada satu Opini Utama (biasanya berdasarkan Laporan Utama) dan empat Opini lain yang diambil dari kompartemen-kompartemen yang ada di majalah Tempo seperti hukum, ekonomi, dan nasional. Ada beberapa kriteria berita yang menjadi *headline*/Opini Tempo. Menurut informan 1, berita tersebut menjadi pembicaraan umum, sorotan/*concern* Tempo, dan penting untuk disuarakan di majalah Tempo. Sementara informan 2 berpendapat bahwa berita dalam Opini Tempo adalah berita yang eksklusif, investigatif dan bertujuan untuk membongkar hal-hal yang merugikan masyarakat.

“Ada hal yang eksklusif ga yang didapat dibandingkan dengan informasi yang sudah beredar sebelumnya. Kadang2 kan Tempo yang menampilkan isu itu sendiri. Misalnya berita penjara si Ayin, itu kan hasil "intipan" Tempo sendiri yang menjadi berita cover story. Beda dengan kasus MD sekarang ini kan berita sudah beredar di kepolisian. Eksklusifitas itu hal yang baru, kemudian ada unsur investigasinya, artinya ada yang dibongkar, kalau flat aja kan seperti media yang lain aja”.

Dalam kasus Ahmadiyah, informan 3 melihat hal tersebut sebagai isu yang menarik untuk diangkat karena merupakan konflik agama yang tidak pernah selesai, ada korban yang meninggal, dan adanya anggapan bahwa kasus tersebut merupakan skenario dari Jakarta.

Disini nilai berita menjadi standar dan ukuran dalam praktik kerja jurnalistik. Berita mana yang layak diberitakan, yang tidak layak diliput, atau berita mana yang akan ditempatkan sebagai headline, dipilah berdasarkan standar nilai berita.

Setelah disepakati berita-berita yang akan menjadi Opini Tempo kemudian diputuskan apa yang akan dibicarakan dalam opini tersebut, proses penulisan berita dan Opini, serta proses editing. Menurut informan 1, dalam pendelegasian tugas penulisan opini, setiap wartawan dan redaktur pelaksana mendapat jatah setiap satu bulan sekali. Sementara informan 3 dengan rinci memaparkan proses produksi berita yang menjadi *headline*/Opini Tempo:

“Laporan utama kan jadi jualan jadi bahan jualan Tempo. Itu berarti berita unggulan Tempo minggu ini. Akhirnya sebelum jadi, sebelum keluar/cetak harus benar-bener diuji dulu. Apa sih kelebihan berita ini sehingga kemudian harus dijadikan laporan utama itu ada prosesnya. Prosesnya gimana? Seperti tadilah, mulai dari rapat kompartemen, rapat perencanaan. Rapat perencanaan tuh kalo misalnya deadline itu gak cuma mengusulkan tapi lintas usulan, itu di rapat perencanaan. Nanti di hari rabu itu ada rapat checking, ada rapat opini. Nanti hari kamis itu ada rapat checking lagi. Kamis masih ada. Apa yang kamu peroleh, bahan apa yang kamu peroleh selama 4 hari ini. Selama dari senin sampai kamis rencana nulisnya, gimana kira-kira nulisnya? Berdasarkan bahan yang kami peroleh, kami berencana nulisnya tuh seperti ini mulai dari fakta yang ini, kemudian plot atau alur atau apa flowchart kalo di kita itu terus nanti di sana, redpel juga bilang kamu gak bisa seperti ini, bareng-bareng dirapatin dari kejadian di sini. Pembabakannya ada juga. Tidak ada satupun hal di sini yang diputuskan sendiri. Semuanya diskusi dan dirapatin”.

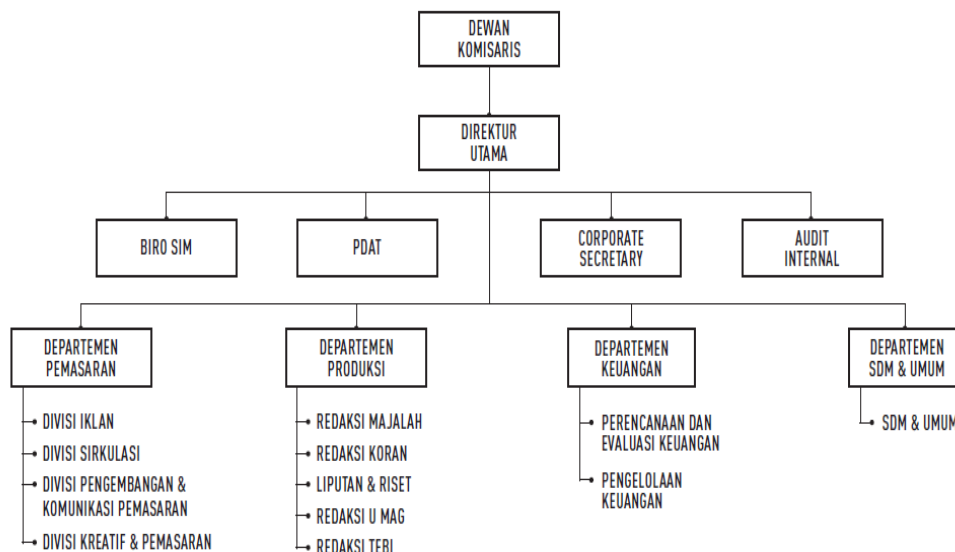
3. Organisasi

Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese yang mempengaruhi isi media dijelaskan bagaimana organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan jurnalis bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan.

Organisasi tempo dapat dilihat secara jelas melalui studi pustaka yang didapat dalam Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media TBK 2010. Praktik organisasi semacam ini yang dimaksudkan sebagai pembagian kerja, efektivitas dan pelimpahan wewenang, akhirnya menjadi membentuk organisasi sebuah media.

Dan ini dijelaskan lagi dalam struktur organisasi melalui studi pustaka pada Majalah Tempo yang terdiri daripada pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktor eksekutif, redaktor senior, redaktur, staf redaksi, reporter, desain visual, redaktor bahasa, dokumentari dan riset. Semuanya berperan dalam mengisi pemberitaan di majalah Tempo. Hal ini juga terkait dengan rutinitas majalah Tempo yang sudah secara tradisi mewarnai pemberitaan Tempo yang akan dijelaskan dalam poin berikutnya. Bagi struktur pembahagian di majalah Tempo terdapat beberapa rubrik yang mempunyai peranan masing-masing seperti rubrik hukum, rubrik ekonomi, rubrik nasional. Ini dapat dilihat melalui kenyataan yang diberikan oleh informan ketiga. Organisasi media juga tak terlepas dari rutinitas media dalam proses seleksi dan memproduksi berita yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam poin berikutnya nanti.

Gambar 2. Struktur Perusahaan PT Tempo Inti Media Tbk.



Sumber: Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk. Tahun 2010

Selain itu, setiap organisasi berita yang mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya jurnalis bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. Ini termasuklah dalam kultur organisasi sebuah media. Di sini Tempo turut memperlihatkan kultur organisasinya yang tersendiri. Sepertimana yang didapatkan daripada informan 1. Kultur organisasi Tempo membiasakan para pekerja di dalamnya

untuk bersikap kritis, mau menyampaikan dan menerima kritikan secara terbuka dalam membuat pemberitaan Tempo yang lebih berani.

“Kultur..pertama kultur keterbukaan, kultur untuk menerima dan memberi kritik secara terbuka. Kemudian kultur ee..kultur apa yang menurut saya sama rendah dan sama tinggi berdiri, kultur argumentasi, jadi ga ada otoriter disini. Itu menurut saya. Buat teman-teman. Saya gak suka, kenapa gak nulis ini? Ya karena abcd gak menarik. Jadi gak ada pemaksaan untuk penulisan”.

Seterusnya diperkuat lagi dengan informan 3 menyatakan bahwa Tempo membuka ruang yang seluasnya bagi setiap ahlinya untuk melontarkan idenya. Kemudian dari ide tersebut didiskusikan bersama dan diuji sebelum ide tersebut dijadikan kata putus. Ini memperlihatkan kultur organisasi Tempo yang masih mengekalkan filofis yang tersendiri untuk menjadikan segala pemberitaannya berimbang dan kritis.

“Intinya kalo misalnya kita merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil ya sampaikan aja...menyampaikan sesuatu, ide kita uji gagasan kita dengan dengan berdebat, dengan diskusi kalo bahasa halusnya. Kita..kita uji argumen kita misalnya dengan pendapat orang lain. Tapi keputusannya tetap bukan keputusan pribadi tapi keputusan rapat bahwa ini kekurangan dar ini, ini ini ini..”.

Informan 3 turut menguatkan kenyataannya tentang prinsip Tempo terutama berkaitan dengan majalah Tempo dimana:

“Kalo majalah lebih mendalam, lebih mendetil, harus bisa membongkar ada apa di balik berita kan itu. Saya..saya harus dapat berita detil dan harus dapat ee apa namanya konfirmasi dari orang yang kita tuduh...”.

4. Pengaruh Ekstra Media (iklan)

Tempo memisahkan antara redaksi dengan divisi iklan dan membentuk *firewall* dimana keduanya tidak boleh saling tahu “isi dapur” masing-masing. Dalam hal iklan yang ada di majalah Tempo, pemberitaan yang ada sama sekali tidak pernah dipengaruhi oleh pihak pemasang iklan. Tempo tak takut tidak ada yang memasang iklan walaupun isi berita terkadang memojokkan satu pihak. Informan 1 mengatakan tidak ada pengaruh ekstra media (lingkungan bisnis dan iklan) dalam proses pemberitaan Tempo.

“Oh enggak, gak ada. Independen sama sekali. Gak ada sama sekali. Opini memang.. memang..”

Selanjutnya informan 2 menegaskan bahwa redaksi Tempo memiliki hak eksklusif untuk menentukan isi berita terlepas dari kepentingan pemilik/pemegang saham dan juga pengiklan. Bahkan redaksi sering mempengaruhi bagian iklan. Kemudian kalau orang iklan memanfaatkan orang redaksi untuk mendapatkan iklan sepertinya tidak kejadian. Sebaliknya gara-gara tulisan orang redaksi, iklan yang henggang itu beberapa kali terjadi. Di dalam perusahaan kan menerapkan pagar api bahwa redaksi dan divisi iklan tidak boleh saling mengetahui. Kalau pengiklan tidak berkenan dengan pemberitaan mereka boleh mencabut iklannya. Urusan orang redaksi sama orang iklan berbeda. Sejauh ini independensi masing-masing dunia usaha itu terjaga.

“Pada prinsipnya firewall artinya orang iklan bertugas mendapatkan iklan, mereka bebas mengupayakan usaha-usahanya utk mendapatkan iklan sesuai dengan norma-norma dalam dunia periklanan. jangan sampai (beliau berkata "susah kalau dijelaskan"). Kemudian kalau orang iklan memanfaatkan orang redaksi untuk mendapatkan iklan rasa-rasanya ga kejadian. Malahan terbalik gara-gara tulisan orang redaksi, iklan yang henggang itu beberapa kali terjadi. Nah, kita di dalam kan menerapkan pagar api bahwa kita tidak boleh saling mengetahui. Kalau pengiklan tidak berkenan dengan pemberitaan mereka boleh mencabut iklannya. Urusan orang redaksi sama orang iklan berbeda. Sejauh ini independensi masing-masing dunia usaha itu terjaga.”

5. Ideologi Media

Tempo menggunakan metode investigasi untuk mencari fakta di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh Informan 1, Tempo berkeyakinan bahwa pemberitaan yang disampaikan hanya bertujuan untuk mengungkapkan fakta. Tempo berpendapat pemberitaan yang disampaikan berdasarkan fakta di lapangan dalam mengungkapkan kebenaran.

“Keyakinan di dalam bahwa kita menulis sudah seimbang. Tidak ada mengada-ngada. Berdasarkan fakta, berdasarkan riset, berdasarkan ke lapangan. Sehingga kalo istilah saya semua celah-celah untuk orang menggugat Tempo sudah kita tutup semua. Silahkan bawa ke hukum kalo memang keliru gitu loh. Kalo kita misalnya kita nulis soal preman ya kita datangi preman itu. Jadi kalau preman itu masa mau menyerang tempo, kan anda sudah bicara kemarin sama kami, gitu loh mas. Nah itu yang kita jaga dalam setiap tulisan-tulisan. Kalau orang itu gak mau diwawancara ya kita tulis di majalah kita bahwa orang itu gak mau diwawancarai. Dah kita datengin sering. Tapi tetap kita upayakan mbak. Tugas seorang wartawan itu mengupayakan betul-betul. Jadi memang sudah dikejar betul dan orang ini yang lari. Bukannya..bukannya, kita dah ngasih waktu loh, kesempatan buat anda gitu loh.”

Ideologi Tempo adalah pluralisme yakni menghormati kemajemukan yang ada di dalam masyarakat. Informan 2 menjelaskan ideologi pluralisme terutama dalam pemberitaan kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik. Serta ideologi Liberal dalam pemberitaan secara umum.

“Yang membedakan angle, Tempo itu kan pro-pluralisme. Saya kira ada itu di visi misi media Tempo, bentar saya cek (melihat buku profile Tempo). Di visi misi Tempo ada.”

Informan 3 menekankan bahwa Tempo lebih percaya pada mekanisme pasar dimana sukses tidaknya media ditentukan oleh kepercayaan pelanggan/pembaca.

“Liberal, kita membela data. Artinya kita membuat berita mengacu kepada data. Ya walaupun kadang kita bertentangan dengan pendapat kebanyakan ya ga papa asal kita benar dari pada kita ngikutin kebanyakan tapi salah.”

Selain ideologi pluralis dan liberal, Tempo juga memiliki ideologi sekuler, yakni memisahkan urusan agama dan sosial politik. Ideologi sekuler memandang bahwa urusan agama dan keyakinan adalah urusan individu masing-masing. Negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan agama dan keyakinan warga negaranya. Hal itu tercermin dalam informan 3 :

“....sebagai media jangan ikut ngompor-ngompori. Kalo bisa meluruskan. Meluruskan fakta lah, memilah gitu ya. Kalo kita ikut ngompori Ahmadiyah itu sesat tambah celaka negara ini. Nah makanya kemudian kita luruskan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya keyakinan kan ranah private, urusan dia sama Tuhan apakah itu salah ya urusan dia gitu.”

Informan 3 secara pribadi tidak setuju dengan ajaran Ahmadiyah. Namun ideologi sekuler yang tumbuh di Tempo mempengaruhinya untuk menganggap bahwa salah dan benar ajaran Ahmadiyah menjadi urusan mereka dengan Allah SWT.

“saya gak setuju itu karena yang saya pahami dari Islam kalo memang seperti itu tidak sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari. Tapi kalo mereka mau melakoni ya monggo saya salah bener nanti lah di akherat.”

Ideologi sekuler juga sangat jelas terlihat dalam opini Tempo berjudul “Ahmadiyah Tanpa Negara” pada edisi 14 – 20 Februari 2011

“Pemerintah, MUI, atau lembaga mana pun tak memiliki otoritas menentukan label Islam atau bukan Islam bagi Ahmadiyah. Setiap bentuk pemaksaan dalam berkeyakinan dan menjalankan keyakinan merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi.”

Pandangan Tempo Tentang Kasus Ahmadiyah Cikeusik

Majalah Tempo memiliki sudut pandang tersendiri dalam memberitakan kasus penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011. Dari hasil pengumpulan data terhadap beberapa informan penelitian ini, didapatkan sudut pandang Tempo dalam memandang kasus Cikeusik tersebut.

Sudut pandang dominan yang diyakini oleh Tempo adalah bahwa kasus Cikeusik tersebut telah menodai pluralisme yang ada di Indonesia. Dalam pandangan Tempo, Indonesia merupakan negara pluralis yang memiliki keragaman dalam suku, budaya, adat istiadat serta agama. Oleh karena itu dalam pandangan Tempo tidak dibenarkan suatu keyakinan (agama) yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di Indonesia disalahkan

bahkan dihakimi oleh kelompok masyarakat yang lain.

Seperti yang diutarakan oleh informan 1: *“.....menurut tempo tidak benar suatu keyakinan orang itu kemudian dihakimi.”* Senada yang dikatakan oleh informan 3: *“...perbedaan keyakinan atau perbedaan prinsip dalam beragama bukan alasan bagi kita untuk menghakimi orang lain. Siapa tahu apa yang saya pahami atau saya yakini justru salah...”* Tentang sudut pandang Tempo yang pro terhadap pluralisme disampaikan oleh informan 2 : *“....Tempo itu kan pro-pluralisme. Saya kira itu ada di visi-misi Tempo.”*

Meski demikian, Tempo juga tidak secara jelas mendukung Ahmadiyah. Menurut informan 2 hal yang dipersoalkan dalam kasus Cikeusik bukan membela Ahmadiyah melainkan mempersoalkan unsur kekerasannya.

“....Memang ya sebetulnya kan bukan masalah ahmadiyah boleh beribadah secara bebas. Yang dipermasalahkan Tempo kan tindakan pembantaianya, tindakan anarkisnya gitu.Nuansa pemberitaan kita tentang pemberitaan Ahmadiyah itu tentang pembantaianya..... Saya kira hampir 99% umat Islam di Indonesia tidak setuju dengan tindakan pembantaian itu. Bahwa setelah itu Ahmadiyah mestinya bagaimana, Ahmadiyah itu bersikap atau disikapi, ya itu tahapan kerja yang berikutnya lah....”

Menurut informan 3 kasus Cikeusik merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang disampaikannya *“....sikap kita tetap sama. Kita bersikap (kasus) Ahmadiyah itu bertentangan dengan HAM...”*. Bagi informan 3 yang terjun langsung di lapangan meliput berita tersebut mengatakan bahwa cara Tempo memberitakan tentang kasus Cikeusik apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. *“....tulisan ini bukan opini, bernada atau bersikap membela ahmadiyah, atau temuan lapangan saya seperti itu ya karena saya menemukannya seperti itu gitu ya...”*, ujarnya.

Informan 3 memandang bahwa kasus Cikeusik adalah persoalan hukum dan seharusnya dibawa ke ranah hukum.

“.....sikap kita kan berdasarkan hukum positif ya. Bahwa dalam undang-undang dasar misalnya bahwa setiap warga negara berhak beribadah, berhak meyakini ajarannya masing-masing. Kalau kita berpandangan bahwa Ahmadiyah adalah termasuk warga negara Indonesia berarti dia mendapatkan haknya gitu kan? Makanya kemudian sikap kita bukan membela ahmadiyah tapi membela konstitusi.....”

Masih menurut informan 3 persoalan pengaturan ibadah keagamaan seharusnya dijamin oleh negara.

“.....kehidupan beragama kita saat ini bisa dibilang memprihatinkan ya. Bahwa di jaman yang seharusnya lebih bebas, pasca reformasi ini, lebih terjamin karena undang-undang HAM pun setelah reformasi. Seharusnya kemerdekaan berkeyakinan, beragama itu terjamin kan...”

Tentang ajaran Ahmadiyah sendiri memang tidak banyak disinggung oleh Tempo. Namun dari pendapat yang disampaikan oleh informan 3 diketahui bahwa ia secara pribadi memiliki ketidaksetujuan terhadap ajaran Ahmadiyah namun demikian menurutnya ketidaksetujuan tersebut tidak membuat dirinya menghakimi Ahmadiyah salah atau benar. Di sini terlihat bahwa individu yang tergabung di Tempo memiliki ideologi sekuler dimana memisahkan persoalan agama dengan pemerintahan. Agama adalah urusan pribadi masing-masing.

“.....saya gak setuju itu karena yang saya pahami dari Islam kalo memang seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari. Tapi kalo mereka mau melakoni ya monggo saja. Salah bener nanti lah di akherat.ada beberapa hal yang mungkin saya gak ketahui di balik ketidaksetujuan saya bahwa misalnya tazkirah (kitab Ahmadiyah) apakah seperti kitab suci lain. saya belum pernah membacanya. Bagaimana saya bisa mengadili seseorang tanpa saya mempelajarinya lebih dahulu. Bahwa saya bisa menganggap Ahmadiyah salah, di balik ketidaksetujuan saya, saya menghakimi orang lain tanpa saya sendiri tahu secara objektif....”

Informan 3 memiliki informasi tentang Ahmadiyah yang terbagi dalam dua aliran yaitu Qadiyan dan Lahore. Aliran Ahmadiyah Qadiyan menganggap Mirza Gulam Ahmad bukan sebagai nabi melainkan sebagai imam dan pembaharu (mujadid). Menurut informan 3 hal itu tidak menyalahi ajaran Islam. Informan 3 juga lebih melihat Ahmadiyah sebagai salah satu keyakinan yang tidak pernah berbuat destruktif.

“....terlepas dari masalah teologi mereka dan sebagainya, saya pikir tidak ada hal yang sifatnya destruktif gitu yah terhadap kehidupan berbangsa kita. Bandingkan dengan kelompok radikal lain yang terang-terangan misalnya merusak tempat ibadah atau melakukan kekerasan, menyerang orang. Itu kan sudah membahayakan. Jelas

perbuatannya ada. ini nggak. Kenapa mereka yang hidupnya damai kemudian dipersalahkan....”

Selain faktor kekerasan yang menjadi perhatian Tempo tentang kasus Cikeusik, Tempo juga memandang bahwa kasus Cikeusik sarat dengan muatan politis. Hal itu disampaikan oleh informan 3:

“.....kenapa kekerasan itu baru terjadi sekarang? Itu yang jadi pertanyaan kita juga. Apakah karena potensi konflik ini dimanfaatkan oleh orang lain atau ada yang mengambil keuntungan dari itu kita gak tau....”

Informan 3 juga menyampaikan bahwa ketika peristiwa Cikeusik terjadi pada tanggal 6 Februari 2011 terdapat beberapa isu yang diterima oleh pihak redaksi Tempo terkait peristiwa tersebut.

“.....ada skenario-skenario yang sampai ke kita. Misalnya pertama ada konflik agama, ada orang yang mati, kemudian Ahmadiyah yang gak pernah selesai gitu-gitu, terus ada skenario dari jakarta.....”

Sudut pandang yang digunakan oleh Tempo dalam memberitakan kasus Cikeusik diyakini tidak akan menimbulkan protes dari pelanggannya. Memang, Tempo merupakan media yang mendasarkan perhatiannya pada pembaca atau pelanggan. Bagi Tempo pelanggan adalah tolok ukur evaluasi sebuah pemberitaan. Maka, saat tidak ada protes dari pembaca terhadap pemberitaan tentang kasus Cikeusik, Tempo menganggap telah menggunakan sudut pandang yang benar dalam memberitakan kasus tersebut. Hal itu disampaikan oleh informan 2 :

“.....Saya rasa iya (tanggapan positif-red) karena tidak ada protes. Kalau protes kan bisa kirim surat pembaca, atau pembaca Tempo berkurang, secara signifikannya ya. Saya rasa gejala itu nggak ada.kita percaya bahwa pembaca Tempo itu kira-kira ya sependapat dengan pendapat Tempo. Pembaca Tempo kan sebelumnya ya mayoritas orang muslim juga.... Memang faktanya kan ga ada orang yang setuju dengan pembunuhan pembantaian itu kan ngga ada.....”

Informan 3 juga memiliki keyakinan bahwa apa yang telah ditulisnya adalah fakta di lapangan yang tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kelompok tertentu.

“.....yang diceritakan fakta karena mereka sadar betul kalo ada apa apa lapor ke dewan pers. Kalau FPI (Front Pembela Islam) ga ada urusan kan. Kalau ada yang salah FPI udh protes kali ya... Undang-undang pers itu waktunya (protes) kan sampe 6 bulan ya kalo ga salah. Jadi setelah 6 bulan ga bisa protes lagi....”

Simpulan

Dari paparan di atas, nampak bahwa faktor ideologi Tempo yang liberal, sekuler dan pluralis mendominasi pemberitaan tentang kasus Ahmadiyah Cikeusik. Ideologi liberal Tempo mendasarkan diri pada respons pelanggan. Tempo sangat menaruh perhatian besar pada pelanggan. Dalam pandangan Tempo, selama pelanggan Tempo tidak berkeberatan dengan isi berita Tempo, maka berita tersebut dinilai benar. Sebaliknya, jika muncul respons negatif dari pelanggan seperti surat pembaca maupun penurunan jumlah pelanggan, maka berita tersebut akan dievaluasi kembali. Tempo juga amat menjaga kepercayaan pelanggan yang menaruh harapan besar akan independensi majalah Tempo. Hal yang amat dikhawatirkan adalah jika pelanggan mencap Tempo sudah tidak independen lagi.

Ideologi sekuler juga tampak mendominasi pemberitaan tentang Ahmadiyah Cikeusik. Melalui ideologi ini, seluruh jajaran redaksi yang terlibat dalam proses produksi berita tentang Ahmadiyah Cikeusik akan memandang bahwa persoalan ajaran Ahmadiyah adalah persoalan individu dan oleh karenanya tidak ada hak bagi negara ataupun kelompok masyarakat manapun mencampuri urusan keyakinan tersebut.

Sedangkan ideologi pluralis tampak pada pandangan dan pernyataan hampir semua informan yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari keanekaragaman keyakinan yang ada di Indonesia. Maka upaya untuk menyeragamkan suatu keyakinan tidaklah dibenarkan.

Adapun faktor Individu, organisasi, ekstra media memiliki peran yang tidak begitu besar dalam mempengaruhi isi berita tentang kasus Ahmadiyah Cikeusik. Individu yang terlibat dalam proses produksi berita kasus Ahmadiyah Cikeusik bertugas mengumpulkan fakta di lapangan sudah terpengaruh oleh ideologi Tempo yang sekuler dan pluralis. Hal itu mengakibatkan berita tentang Ahmadiyah Cikeusik lebih banyak memaparkan kronologis peristiwa dan data tentang kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Faktor organisasi dan ekstra media tampak pula tidak begitu dominan dalam proses produksi berita kasus Ahmadiyah Cikeusik. Hal ini disebabkan karena peristiwa Ahmadiyah Cikeusik tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perusahaan atau institusi politik tertentu yang erat kaitannya dengan konstituen Tempo. Unsur kemanusiaan yang kuat mewarnai peristiwa Cikeusik menyebabkan bidang-bidang di luar redaksi tidak banyak mencampuri dan mempengaruhi pemberitaan ini.

Sementara faktor rutinitas media dinilai memiliki peran dalam menguatkan ideologi Tempo. Melalui serangkaian rapat, rapat kompartemen, rapat redaksi besar dan rapat opini, ideologi Tempo yang liberal, sekuler dan pluralis dijaga dengan kuat. Hal itu menutup kemungkinan masuknya ideologi individu dalam tulisan berita tentang Ahmadiyah Cikeusik.

Keberanian Tempo dalam memberitakan peristiwa Ahmadiyah Cikeusik yang membela Ahmadiyah dan menentang pandangan dominan, turut dipengaruhi oleh prinsip-prinsip jurnalistik yang dipegang kuat oleh Tempo. Prinsip disiplin verifikasi yang dijalankan oleh Tempo meminimalisir kemungkinan munculnya gugatan dari pihak yang tidak senang atas pemberitaan Tempo. Begitu pula dengan prinsip jurnalistik pemantau kekuasaan dan menyuarakan kaum tak bersuara turut dijalankan oleh Tempo dalam memberitakan peristiwa Ahmadiyah Cikeusik. Tempo memandang Ahmadiyah sebagai kelompok yang tertindas karena selalu menjadi korban kekerasan. Hal itulah yang menyebabkan Tempo memosisikan diri mendukung Ahmadiyah. ###

ENDNOTE

¹ Dari Serangan Lalu Dialog. Artikel berita pada Majalah Tempo Edisi 14 – 20 Februari 2011.

² *id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah*

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Pesan Pendek Sebelum Angkara Murka. Artikel berita pada Majalah Tempo Edisi 14 – 20 Februari 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods. 3rd Edition*. New York: Oxford University Press.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel. (2001) *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. New York: Crown Publishers.
- Littlejohn, S.W. (2002). *Theories of Human Communication 7th Edition*. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Neuman, W.L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach. 3rd Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods. 3rd Edition*. USA: Thousand Oaks Sage Publication.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Ritzer, G dan Douglas J.G. (2004). *Teori Sosiologi Modern (terjemahan) Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana.
- Shoemaker, P.J. dan Stephen D.R. (1996). *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content 2nd Edition*, New York: Longman Publishers.

Majalah dan Dokumen

- (1) Majalah Tempo, Edisi 14-20 Februari 2011.
- (2) _____, Edisi 21-27 Februari 2011.
- (3) _____, Edisi 7-13 Maret 2011.
- (4) Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk. 2010

Internet

id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah